

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Tahap Pemulihan Covid-19 di Sektor Pariwisata dan Pengurangan Resiko Bencana

Burhanudin Mukhamad Faturahman^a, Teguh Kurniawan^b, Vishnu Juwono^c

^aPusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI

^{b,c}Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

e-mail : ^a burhanmfatur@gmail.com, ^b teguh.kurniawan@ui.ac.id ^c vjuwono@ui.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak di sektor pariwisata berupa penurunan pengunjung dan pendapatan daerah. Kota Bandung merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata untuk pembangunan di daerah dimana sektor pariwisata mengalami penurunan cukup signifikan selama masa pandemi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemulihan bencana Covid-19 di sektor pariwisata Kota Bandung dan kaitannya dengan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah wisatawan dari 8,4 juta di tahun 2019 menjadi 3,2 juta di tahun 2020. Keterisian hotel juga turun 43,4% rata-rata pertahun mejadi hanya kurang dari 10%. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan asil daerah Kota Bandung utamanya pada hotel dan restoran. Upaya yang dilakukan Pemkot Bandung yaitu merelaksasi pajak pelaku usaha, mencari pajak baru dalam skala lokal, melakukan pemulihan dengan memberikan hibah dan sembako, mempersiapkan SDM untuk mengantisipasi perubahan di era pandemi dan melakukan optimalisasi pada pemasaran secara online di tahap normalisasi. Sementara itu pengurangan risiko bencana diwujudkan melalui penerapan CHSE di kawasan wisata yang dilaksanakan oleh pengusaha, pengunjung dan karyawan.

Kata Kunci: pemulihan; pariwisata; pengurangan risiko bencana

Covid-19 Recovery Phase in the Tourism Sector and Disaster Risk Reduction

Abstract

The Covid-19 pandemic impacts the tourism sector in the form of a decrease in visitors and regional income. Bandung city is an area that relies on the tourism sector for development in areas where the tourism sector has experienced a significant decline during the pandemic. The study's purpose is to determine the efforts to recover from the Covid-19 disaster in the tourism sector of Bandung City and its relation to disaster management. he results showed that there was a decrease in the number of tourists from 8.4 million in 2019 to 3.2 million in 2020. Hotel occupancy also fell by 43.4% on average per year to just under 10%. This has an impact on reducing the income of the Bandung City area, especially in hotels and restaurants. The efforts made by the Bandung City Government are relaxing taxes on business actors, looking for new taxes on a local scale, making recovery by providing grants and necessities, preparing human resources to anticipate changes in the pandemic era, and optimizing online marketing at the normalization stage. Meanwhile, disaster risk reduction is realized through the application of CHSE in tourist areas carried out by entrepreneurs, visitors, and employees.

Keywords: recovery, tourism, disaster risk reduction

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Kejadian bencana pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 memberikan dampak serius pada sektor ekonomi khususnya sektor pariwisata. Kemendagri (2020) menyatakan sektor yang sangat mengandalkan mobilisasi manusia sebagai input kinerja ekonomi ini mengalami penurunan dari aspek okupansi hotel dari 56,73% menjadi 28,07% (Juli 2019-Juli 2020) dan menurut BPS (2021) kunjungan wisman turun 75,03% serta wisnus turun 61% di tahun 2020. Penurunan tersebut mengancam keberlangsungan 13 juta pekerja langsung dan 32,5 juta pekerja tidak langsung di sektor pariwisata (egsaugm, 2021).

Kota Bandung merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata untuk menunjang pembangunan di daerah. Apabila ditinjau dari komposisi PDRB menurut lapangan usaha, Sukriah (2014) melakukan analisis tipologi Klassen menunjukkan bahwa terdapat pergeseran potensi ekonomi di Kota Bandung, namun sektor pariwisata tidak mengalami perubahan. Artinya, sektor pariwisata termasuk dalam sektor unggulan daripada sektor-sektor ekonomi lainnya karena memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dan pertumbuhannya yang cepat.

Kontribusi riil pariwisata sebagai penopang ekonomi Kota Bandung dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nababan, et al (2021) mengungkapkan sebesar 33% PAD atau 740 miliar kota Bandung berasal dari aktifitas pariwisata baik dari pajak hotel, hiburan, sampai dengan restoran. Selain itu jumlah kunjungan wisnus mencapai 7,5 juta sedangkan wisman mencapai 155 ribu di tahun 2018.

Sejak awal kemunculan kasus Covid-19 di Kota Bandung per 3 April 2022, virus ini menyebar dengan cepat dan menginfeksi 28 orang diantaranya 6 orang meninggal dunia (Supono, et al, 2020). Terlebih provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran Covid-19 membuat sektor pariwisata menjadi tertekan.

Sejak adanya virus ini, sektor pariwisata Kota Bandung mengalami penurunan. Tercatat, terjadi penurunan jumlah wisnus tahun 2020 sebesar 50% atau berkisar 3,2 juta lebih rendah daripada tahun 2019. Hal ini berdampak langsung

padapenurunan PAD menjadi sekitar 391 miliar rupiah serta berdampak pada pelaku pariwisata lainnya seperti perhotelan, usaha kreatif dan sebagainya (Purike, 2021).

Upaya perbaikan sektor pariwisata menurut Wahyuni (2021) terus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan inovasi (pemanfaatan teknologi), adaptasi (penerapan CHSE pada destinasi), dan kolaborasi (pemerintah, perbankan, pelaku usaha dan swasta). Pemulihan aktifitas ekonomi di tengah darurat Covid-19 memiliki kendala dalam kapasitas kebijakan. Khusus untuk sektor pariwisata terdapat kendala pada penerima bantuan yang terbatas artinya tidak semua pelaku usaha pariwisata menerima bantuan insentif (Rosyadi, 2021, et al).

Pentingnya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan sektor pariwisata merupakan keterpaduan kebijakan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana. Dalam UU 24/2004 tentang bencana, keterpaduan program pembangunan dan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. Hal ini penting karena pariwisata memerlukan sebuah jembatan berupa persiapan dan komitmen untuk mencegah memburuknya kasus Covid-19 sembari mencegah keterpurukan ekonomi di sektor pariwisata.

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana upaya pemulihan bencana Covid-19 di sektor pariwisata Kota Bandung dan bagaimana kaitannya dengan penanggulangan bencana. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemulihan bencana Covid-19 di sektor pariwisata Kota Bandung dan kaitannya dengan penanggulangan bencana.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Adapun wawancara dilakukan dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Kota Bandung dan Perhimpunan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) perwakilan Jawa Barat. Sedangkan analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan.

Kondisi pariwisata Kota Bandung pada saat pandemi Covid-19 sangat terpuruk sebagai akibat dari kebijakan pembatasan operasional sektor-sektor pariwisata serta pengendalian kerumunan yang notabene merupakan ciri khas dari sektor pariwisata. Akibatnya, dari seluruh sektor ekonomi, sektor pariwisata menjadi yang paling terdampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terlihat penurunan yang sangat signifikan jumlah kunjungan. Kondisi ini tentu saja berakibat terhadap penurunan tingkat hunian serta kelangsungan usaha semua sektor pariwisata termasuk Hotel dan Restoran. Hasil wawancara dengan pihak PHRI disebutkan bahwa pada tahun 2020 jumlah hotel yang tutup adalah 560 unit serta 280 unit restoran yang tutup.

Tabel 1 Jumlah Kujungan Wisatawan Kota Bandung tahun 2018-20120

	2018	2019	2020
Misnus	7,3 juta	8,1 juta	3,2 juta
Wisman	227 ribu	252 ribu	30 ribu
total	7,5 juta	8,4 juta	3,2 juta

Sumber: Disbudpar Kota Bandung, 2021

Rata-rata tingkat hunian serta kunjungan menurun drastis dari 43, 4% rata-rata pertahun mejadi hanya kurang dari 10%, yang tentunya berdampak pada penurunan pendapatan Hotel dan Restoran serta berdampak juga terhadap status tenaga kerja sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki *multiplier effect*, dimana sebanyak 6.940 karyawan dari 178 Hotel dan 1.238 karyawan Restoran Kota Bandung merasakan dampak dari pandemi ini. Para pekerja tersebut Banyak yang berhentikan. Penurunan pendapatan hotel dan restoran juga berdampak pada berkurangnya pengiriman pasokan bahan makanan ke hotel dan restoran sehingga pendapatan dari supplier, distributor dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok ini turut berkurang.

Pembatasan pergerakan dan mobilitas masyarakat, pelarangan dan pembatasan jam operasional usaha serta pembatasan kapasitas dan jumlah pengunjung pada usaha hotel, restoran dan hiburan menjadikan penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Seperti diketahui, sumber pendapatan dan penerimaan asli daerah yang paling menonjol dan menjadi andalan di Kota Bandung adalah pajak hotel, restoran, BPHTB, PBB, reklame.

Tabel 2. Perbandingan realisasi pendapatan daerah Kota Bandung (dalam miliar).

Pendapatan pajak daerah	Tahun 2019	Tahun 2020
Hotel	314	154
Restoran	368	212
BPHTB	511	459
PBB	29	27
Reklame	558	505

Sumber: Bapenda Kota Bandung, 2020

Melihat kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata yang besar, tentu saja menyulitkan pemkot pada masa pandemi untuk mencari alternatif lain dengan menambah jenis pajak mengingat bahwa jenis pajak sudah dibatasi dan diatur oleh undang-undang. Dampak dari penurunan pendapatan dari sektor pariwisata terhadap struktur APBD adalah terjadinya menurunnya target APBD baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja.

Terdapat beberapa pilihan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi terjadinya penurunan PAD yaitu:

1. Mengeluarkan kebijakan relaksasi dan insentif pajak daerah berupa penundaan jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta memberikan subsidi berupa menghilangkan denda pajak daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah ketidakpastian dari kondisi pandemi.
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menangani dan mengantisipasi terjadinya penurunan pendapatan.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

3. Mencari alternatif sumber pendapatan daerah lain seperti rencana pemungutan pajak restoran dari pedagang makanan/kuliner kaki lima yang menetap, peninjauan penyesuaian tarif pajak penerangan jalan, peninjauan penyesuaian tarif pajak reklame.
4. Mengantisipasi perkembangan pandemi dengan program vaksinasi dan tetap melanjutkan kebijakan relaksasi dan pemberian insentif pajak daerah sesuai dengan kebijakan yang telah dijalankan.

Dalam memperbaiki kondisi sektor pariwisata, upaya penyelamatan dilakukan melalui tahap tanggap darurat, tahap pemulihan dan tahap normalisasi sebagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Secara garis besar tahap tanggap darurat diprioritaskan penanganan masalah kesehatan, penutupan destinasi, melakukan koordinasi saat masa kritis. Pada tahap pemulihan, upaya dilakukan untuk mengatasi kendala pelaku dan tenaga kerja di sektor pariwisata meliputi:

1. Menyalurkan bantuan berupa:
 - a. Dana hibah Kemenparekraf tahun 2020 sebesar Rp. 21 miliar bagi 96 hotel dan 33 restoran guna membantu operasional serta untuk pembayaran gaji pegawai yang terkena PHK selama tahun 2020
 - b. Menyalurkan bantuan sembako dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota bagi para pelaku usaha pariwisata
 - c. Menyalurkan bantuan alat kesehatan (masker) bagi 3000 pelaku usaha pariwisata di Kota Bandung
 - d. Memfasilitasi penerapan CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, Environmental*) melalui sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf bagi 239 Usaha Jasa Pariwisata hotel dan restoran di Kota Bandung
2. Mempersiapkan SDM pariwisata agar mampu bekerja kembali sesuai tuntutan kenormalan baru:
 - a. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM Pariwisata;

- b. Melaksanakan Fasilitasi kegiatan peran serta masyarakat & kemitraan kelembagaan pariwisata;
 - c. Melaksanakan monitoring & evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - d. Menyusun data dan laporan hasil kegiatan pelatihan, peningkatan Kompetensi SDM pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat.
 - e. Anggaran pendidikan dan atau pelatihan CHSE tahun 2021 disinergikan dengan anggaran pendidikan dan pelatihan SDM pariwisata dengan materi diklat ditambahkan tentang CHSE.
3. Melakukan perubahan pendekatan strategi dalam pengembangan destinasi mengikuti perubahan preferensi dan perilaku wisatawan selama Covid-19 yaitu dengan:
 - a. Pengembangan destinasi berorientasi *quality tourism* dengan penerapan CHSE dan protokol kesehatan di destinasi wisata;
 - b. Pengembangan destinasi yang berorientasi pada peningkatan perilaku wisatawan yang senantiasa telah terjamin dan terbebas dari Covid-19 yang ditandai dengan sertifikat vaksinasi dan hasil PCR.

Pada tahap normalisasi upaya yang dilakukan yaitu melakukan strategi pemasaran pariwisata sesuai dengan masa pandemi yakni:

1. Membuat & menyebarkan *campaign* #StaySafeBandung untuk menjaga kepercayaan wisatawan terhadap keamanan & kenyamanan berwisata di Kota Bandung. Meyakinkan tempat wisata sudah aman untuk dikunjungi dengan menerapkan CHSE dan protokol kesehatan secara ketat di destinasi, hotel, dan restoran serta obyek wisata lainnya di Kota Bandung melalui promosi pariwisata Kota Bandung baik secara online dan media promosi lainnya.
2. Menginformasikan penerapan protokol kesehatan khususnya pada industri pariwisata di Kota Bandung melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, untuk tetap menjaga kepercayaan wisatawan terhadap keamanan dan kenyamanan berwisata di Kota Bandung. Contohnya melalui video, infografis pada sosial media, brosur, dll.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

3. Menginformasikan Jasa Usaha Pariwisata Kota Bandung yang sudah tersertifikasi CHSE (CHSE Certified) melalui berbagai media, untuk tetap menjaga kepercayaan wisatawan terhadap keamanan dan kenyamanan berwisata di Kota Bandung.
4. Mengoptimalkan sosial media untuk mempromosikan sektor pariwisata Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk menjaga *engagement* wisatawan terhadap Kota Bandung. Contohnya melakukan Talkshow melalui IG *live*, mempromosikan tempat-tempat wisata tematik di Kota Bandung, dll
5. Menyelenggarakan *event-event* pemasaran secara daring dan *hybrid*.
6. Berkolaborasi dengan mitra untuk membuat inovasi yang dapat diakses oleh wisatawan selama masa pandemi, seperti *e-book* tentang objek wisata Kota Bandung dan *virtual tour* 360°

Proses pemulihan sektor pariwisata identik dengan upaya pencegahan risiko bencana yang bertujuan meminimalkan penyebaran virus ditengah berlangsungnya aktifitas pariwisata. CHSE merupakan program sertifikasi dari Kemenparekraf yang menekankan pada pemenuhan protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Terdapat 60 café/resto, 2 jasa transportasi dan 1 tempat wisata (Saung Angklung Udjo) di tahun 2020 yang telah mendapat sertifikasi CHSE di Kota Bandung.

Pada dasarnya CHSE terdapat fondasi pengurangan risiko untuk mencegah munculnya risiko baru dimana dalam konteks Covid-19 mencegah infeksi pada orang yang berpengaruh pada penambahan kasus baru. Kebutuhan akan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi pandemi Covid-19 selaras dengan upaya pengurangan risiko bencana dalam UU bencana.

Penerapan umum terhadap CHSE ini berlaku pada hotel sebagai salah satu aspek penting pencegahan penyebaran Covid-19 sektor pariwisata. Berikut langkah dalam penerapan protokol kesehatan di hotel (Aprilia, Marini & Yahya, 2021):

1. Cleanliness. Tersedianya SOP dengan indikator yang telah ditentukan sehingga pengunjung dan karyawan terjamin dari segi

2. Healthy. Pengunjung wajib bermasker dan face shield dan sarung tangan. Ketersediaan APD saat diperlukan memenuhi segi protokol kesehatan.
3. Safety. Memastikan adanya SOP penyelamatan diri, adanya sign (tanda) mematikan alat elektronik, mekanisme komunikasi saat darurat.
4. Environmental. Memiliki lokasi yang asri dan pemantauan secara berkala penerapan CHSE.

Pencegahan penyebaran Covid-19 juga dilakukan pada tempat wisata dengan aktor yang berperan adalah pengusaha/pengelola (menyediakan fasilitas protokol kesehatan, pemberian tempat foto dengan jaga jarak, membersihkan semua peralatan secara higienis dan menyiapkan alat komunikasi), pengunjung (mematuhi aturan, membawa alat kesehatan sendiri, tidak kontak fisik dengan karyawan) dan karyawan (mengarahkan diri dan pengunjung agar tidak kontak fisik, membantu jika kondisi darurat, membersihkan alat sesudah dipakai pengunjung, mengingatkan pengunjung taat protokol kesehatan).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Bandung untuk memulihkan sektor pariwisata yaitu melakukan relaksasi pajak bagi pelaku usaha sektor pariwisata dan mencari alternatif pendapatan dari pajak pedagang hingga penggunaan fasilitas umum. Untuk tahap pemulihan bencana di sektor pariwisata sendiri Pemkot Bandung menyalurkan bantuan tunai dan sembako, mempersiapkan SDM pariwisata sesuai perubahan era pandemi, melakukan perubahan pendekatan strategi dalam pengembangan destinasi sesuai perubahan perilaku konsumen. Tahap normalisasi sendiri lebih menekankan sistem pemasaran yang menggunakan sisten daring untuk menarik kembali minat wisatawan.

Pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan upaya pemulihan sektor pariwisata merupakan bentuk dari pengurangan risiko bencana dalam rangka mencegah timbulnya risiko baru. Langkah ini diwujudkan dengan menerapkan CHSE dengan mensertakan aktor dalam pelaku yang berkaitan langsung dengan sektor

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

pariwisata baik pengusaha/pengelola, pengunjung dan karyawan. Seluruh aktor tersebut memiliki peran masing-masing dengan memperhatikan aspek kesehatan saat melakukan aktifitas wisata.

Saran yang dapat diberikan yaitu diperlukan kesadaran dan komitmen baik dari Pemkot Bandung dan pelaku usaha wisata (pengusaha, pengunjung dan karyawan) agar proses pemulihan sektor pariwisata dan pengurangan risiko penyebaran Covid-19 dapat sepenuhnya terwujud. Selain itu perlunya pengurangan risiko penyebaran virus berbasis peran serta masyarakat menjadi penting dengan memperhatikan aspek lokalitas yaitu mengurangi penyebaran mulai dari tingkat lokal.

REFERENSI

- Aprilia, L.R., Marini, S, & Yahya, A. I. (2021). implementasi Protokol Kesehatan CHSE dalam Meningkatkan Kepercayaan Tamu di Hotel. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* Vol. 5 (2), 1-7
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik 1 Februari 2021
- Egsaugm. 2021. *Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi*.
<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/02/> 11 /pariwisata-indonesia-di-tengah-pandemi/
- Kemenparekraf. 2020. Trend Pariwisata 2021. Deputi Bidang Kebijakan Strategis.
- Nababan, S. et al. 2021. Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung dalam collaborative governance. *KINERJA* Vol. 18 (3), 409-415
- Purike, E. 2021. Kendala dan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor pariwisata dan Perhotelan di Kota Bandung. *Cross-border* Vol. 4(2), 566-580
- Rosyadi, S, et al. 2022. Kapasitas Kebijakan Pemulihan Wisata Kreatif di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI" 12-14 Oktober 2021, Purwokerto
- Sukriah, E. 2014. Pariwisata sebagai Sektor Unggulan Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Resort & Leisure* Vol. 11(1), 65-74
- Supono, et al. 2020. Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan Kecamatan Sukasari Bandung. *Merpati* Vol. 2 (1), 28-32
- Wahyuni, D. 2021. Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19 *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 12(2), 121-137